

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komunikasi. Pada konteks ini manusia sebagai makhluk sosial yang dimana membutuhkan interaksi satu sama lain, komunikasi tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi antar individu, akan tetapi dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan hidup. Pada era globalisasi saat ini komunikasi tidak hanya digunakan oleh individu, melainkan semua pihak bahkan semua institusi atau lembaga negara yang dimana saat ini mereka dianggap sebagai organisme hidup yang berinteraksi satu sama lain sehingga terbentuklah sebuah jaringan kerja. Dengan terbentuknya jaringan kerja akan memudahkan individu bahkan kenegaraan sekalipun dalam menjalankan tugas.

Negara sendiri memiliki makna sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah yang sah, dan pada umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi seluruh rakyat pada wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Ada pun syarat primer dari negara adalah memiliki rakyat dan wilayah serta sistem pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekunder dari negara adalah mendapat pengakuan dari negara lain (*De Jure*)

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar dengan jumlah pemilih pada 2019 ini mencapai 192 juta jiwa dan diantaranya ada sekitar 42 juta jiwa pemilih pemula, sehingga setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih maka sudah bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan partisipasi masyarakat

dalam menentukan sosok kandidat yang sesuai untuk mengisi posisi jabatan kepala negara atau daerah. Penggunaan hak pilih oleh masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting karena kemenangan pasangan calon untuk menjadi pemimpin ditentukan oleh seberapa banyak ia memperoleh suara dalam pemilu.

Pertarungan politik di Indonesia mampu memberikan perhatian bagi seluruh rakyat sejak runtuhnya Orde baru pada pertengahan tahun 1998. Tahun 1999 merupakan babak baru pemilu dalam sejarah Indonesia, wajah baru partai mulai banyak bermunculan dan turut meramaikan Kontestasi politik yang dimulai pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 hingga pada Pemilu 2019.

Partisipasi politik masyarakat berguna untuk sarana mengontrol pemerintahan yang terpilih, selain itu partisipasi politik masyarakat dapat menjadi suatu alat untuk menunjukkan eksistensi diri bahkan kelompok sosial yang melalui Mekanisme politik untuk mengoreksi pemerintahan terhadap program yang telah dirancang agar dapat terealisasi dengan baik dan benar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang dibentuk negara untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Terdapat beberapa macam pemilu yang

ada diIndonesia seperti, Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Landasan konstitusional KPU adalah Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yaitu KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. Keanggotaan komisioner KPU berjumlah 7 orang dengan masa jabatan selama 5 tahun. Dalam pelaksanaannya menjalankan pemilu, KPU dibantu Sekretariat KPU yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat KPU ini bertanggung jawab terhadap administrasi organisasi. Presiden mengangkat Sekretaris Jenderal dari calon yang diajukan oleh KPU, kemudian dilantik oleh presiden untuk masa jabatan 5 tahun.

Tugas dan kewenangan KPU secara umum mencakup tiga hal: (1) menetapkan peraturan setiap tahapan Pemilu berdasarkan UU Pemilu; (2) merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses penyelenggaraan tahapan Pemilu berdasarkan UU Pemilu; serta (3) menegakkan ketentuan administrasi Pemilu. Termasuk dalam tugas ini antara lain mendaftarkan, meneliti dan menetapkan partai politik dan perseorangan yang berhak sebagai peserta pemilihan umum, menetapkan anggota KPU Provinsi dari calon yang diajukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi, mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD dan DPD, mendaftarkan, meneliti dan menetapkan daftar calon anggota DPR dan DPRD, dan menetapkan keseluruhan hasil pemilu untuk semua daerah pemilihan.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan

berintegritas tinggi, karena mempunyai nilai strategis yang sangat penting. KPU berfungsi menyiapkan instrumen hukum guna menjamin hak pilih masyarakat Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan pada salah satu point misi KPU yaitu : “Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah Indonesia melalui KPU merupakan tingkat partisipasi atau kesadaran politik masyarakat dalam mensukseskan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilih. Dengan turut berpartisipasi menggunakan hak pilih dapat memberikan pengaruh untuk kepala daerah agar mewakili suara masyarakat sekitar untuk mensukseskan pembangunan daerah bahkan negara. Kesadaran dalam berpolitik di masyarakat merupakan hal yang sangat penting, menurut Harun & Sumarno (2006:129) partisipasi politik menunjukkan kepada sikap integritas mental dan komitmen moral warga ke dalam sistem politik yang sedang berlangsung.

Hal ini bermakna bahwa sistem politik tidak hanya ditentukan oleh tercapainya fungsi primer sistem, namun dapat ditentukan dari kemampuan kemampuan pemerintah pada saat memformulasikan simbol – simbol kekuasaan ke dalam kepentingan negara dan bagaimana kecenderungan warga negara dalam menginterpretasikan simbol tersebut dalam aktualisasi baik secara penerimaan maupun penolakan.

Pada negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, yang melaksanakannya

melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan rakyat dan untuk menentukan orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan pada periode selanjutnya. Negara demokratis umumnya menganggap bahwa dengan banyak partisipasi dari masyarakat akan lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya partisipasi menunjukkan bahwa warga negara turut andil dalam memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri pada kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat dimaknai warga negara tidak memiliki perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Dalam kondisi saat ini pada Pemilu 2019 partisipasi politik dari kalangan milenial cukup banyak terlebih mereka mendapatkan edukasi dari berbagai media baik media massa maupun sosial media. Oleh karenanya pemilu saat ini banyak menjadi perhatian serius berbagai kalangan terutama milenial, yang dimana saat ini tengah memperhatikan bagaimana kinerja KPU dalam penyelenggara pemilu yang dimana memiliki anggaran besar sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu hingga penetapan hasil pilpres yang berujung pada aksi penolakan hasil real count KPU yang biasa disebut *People Power*.

Kondisi pemilu 2019 memang tidak jauh berbeda dengan pemilu pada 2014 lalu, yang dimana pada saat itu pemilu diklaim banyak mengalami kecurangan selama pelaksanaan pemilihan hingga perhitungan. Tetapi yang membedakan dengan saat ini yaitu adanya reaksi dari pendukung paslon pasca penetapan hasil real count dengan cara demonstrasi, para pendukung salah satu paslon tidak terima dengan keputusan KPU yang dimana disinyalir *Situng* milik KPU banyak terjadi

kesalahan dan ketidak sesuaian dengan data C1 di lapangan, sehingga memunculkan gerakan massa People Power, yang dimana ingin menyuarakan tuduhan kecurangan salah satu paslon pada pilpres 2019 ini. Mengutarakan pendapat dimuka umum atau biasa disebut demonstrasi memang tidak ada yang melarang bahkan dilindungi oleh Undang-Undang No.9 Tahun 1998.

Berbicara masalah pemilu ini kita tidak bisa lepas dari peran para generasi milenial atau biasa disebut dengan generasi Y. Istilah ini dicetuskan oleh pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe pada beberapa bukunya. *Generation me* atau *Echo boomers* merupakan istilah lain dari generasi milenial. (<https://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial>).

Pemilih milenial merupakan demografi penting di negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara ini. Sejak tahun 2004, jumlah pemilih muda orang-orang di antara usia 17 dan 25 telah meningkat dari 18 hingga 30 persen. Saat ini, lebih dari setengah dari 196,5 juta pemilih Indonesia berusia di bawah usia 35 tahun.

Generasi Milenial memiliki kisaran rentan usia antara 18-37 tahun yang memiliki keunikan tersendiri dibanding generasi sebelumnya. Dijelaskan melalui penelitian dari Pew Research Center (2016) bahwa milenial dalam kehidupan sehari – hari tidak bisa dipisahkan dari Teknologi komunikasi seperti Internet dan lebih menyukai dunia hiburan yang sudah menjadi kebutuhan. Data dari EACEA (2012) menyebutkan bahwa generasi Y ini cenderung enggan untuk bergabung dengan partai politik, bahkan tergolong tidak mau menggunakan hak pilih suara pada saat

demokrasi. Pirie dan Worcester (1998) mengatakan bahwa generasi Y sering mengalami konflik lingkungan serta tidak berminat terhadap isu dan proses yang sedang terjadi pada politik.

Inilah yang harus dijadikan perhatian serius oleh pemerintah khususnya lembaga penyelenggara pemilu melalui KPU, untuk terus memperhatikan dan mengedukasi para generasi milenial ini agar mendapat wawasan dengan baik dan benar mengenai perpolitikan dan perannya yang ada dalam negeri. Peran KPU sangat penting mengingat generasi ini nantinya juga yang akan menjadi penerus perjuangan dalam membangun negara.

Mengingat saat ini peran pemilih milenial cukup besar sebab jumlah pemilih milenial secara nasional sebanyak 42 juta jiwa, jumlah tersebut bukan angka yang kecil dalam penentuan suara pemilu. Terlebih saat ini suara milenial menjadi perhatian serius para paslon dalam mensukseskan kemenangan, akan tetapi milenial saat ini pandai melihat sosok figure yang tepat dan mampu untuk menarik perhatian dengan program kerja dan cara menyampaikannya dikemas dengan baik secara visual.

Melihat jumlah presentase nasional yang cukup tinggi, disini harusnya pemilih milenial memiliki peran dengan maraknya pemberitaan pada media massa terkait kerusuhan pemilu mulai dari pencoblosan hingga penetapan suara melalui real count KPU, sebab pada saat seperti ini generasi para orang tua justru yang banyak tampil dan mengambil alih dibanding para milenial yang sedikit banyak sudah mulai acuh terhadap permasalahan sengketa pada pemilu 2019 ini, peran

milennial dalam hal ini bisa dengan membuat karya atas kejadian yang sedang terjadi di negara ini terkait kecurangan pemilu atau mungkin adanya kerusuhan pasca penetapan hasil pemilu di Bawaslu. Akan tetapi banyak juga sebagian milennial bergerak di sosial media yang dimana mereka membangun isu terkait kecurangan pilpres, kematian KPPS sesuai pemilu dan ada pula yang menciptakan sebuah karya berupa lagu terkait permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Generasi milennial memang bisa dikatakan generasi yang banyak berkuat dengan dunia digital, seperti bisa dilihat saat sedang ada isu besar yang trending di negara mereka melakukan protes dengan cara yang mungkin bisa dikatakan baru daripada zaman orang tua kita dahulu, yaitu dengan membuat video kompilasi yang berisi pesan terhadap permasalahan yang sedang terjadi di negara ini, ada juga yang menuangkan dalam karya berupa lagu dan disajikan dengan visual yang menarik dan sesuai dengan trend saat ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan para milennial juga turun dan terlibat bersama para orang tua dalam menyampaikan gagasan dengan cara konvensional yaitu demonstrasi. Seperti pada saat penetapan hasil pemilu 2019, kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan beberapa Organisasi mahasiswa ekstra kampus yang hadir dalam menyampaikan tuntutan di Bawaslu terkait isu pemilu yang syarat akan kecurangan, hal ini menandakan kalangan milennial memiliki sikap dalam menentukan siapa paslon yang ingin dikehandaki jadi serta bersikap atas realitas yang sedang terjadi.

Menurut (Cangara, 2013:62) pemilihan strategi diperlukan langkah krusial yang memerlukan tindakan secara hati-hati pada saat perencanaan

komunikasi, sebab jika salah dapat berakibat fatal, karena mengakibatkan kerugian materi, waktu dan tenaga. Oleh karena itu instrumen ini akan membantu Komisi Pemilihan Umum untuk mencapai tujuan dalam mengedukasi kalangan milenial agar turut berpartisipasi dalam kegiatan politik serta dapat menentukan arah sikap politik. Karena dengan adanya sikap yang jelas dari kalangan milenial walaupun tengah ramai pemberitaan pada media massa terkait sengketa pemilu dan adanya gerakan *people power* yang dimana banyak diberitakan akan melakukan makar terhadap pemerintahan, milenial tidak akan terpengaruh isu tersebut dan tetap memegang prinsip sebagai warga negara yang baik dengan menyerahkan segala proses demokrasi yang sedang bersengketa melalui jalur Konstitusional.

Hasil informasi yang didapat dari KPU Jawa Timur jumlah pemilih yang telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 30 juta jiwa dengan presentase jumlah pemilih milenial mencapai sekitar 8,3 juta jiwa, sedangkan pemilih pemula meningkat sekitar 400 ribu dari jumlah DPT Pilkada Jatim 2018. Pada Pemilu 2019, pemilih laki-laki terdiri dari 15.043.257 dan perempuan 15.511.504 pemilih. Sedangkan pada saat Pilkada serentak, tercatat sebanyak 30.155.719 pemilih yang terdiri dari 15.315.352 pemilih perempuan dan 14.840.367 pemilih laki-laki. (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/ardiansyah-fajar/dpt-jatim-meningkat-400-ribu-di-antaranya-pemilih-pemula/full>)

Untuk upaya meningkatkan partisipasi milenial dalam pemilu, melalui KPU Jatim menjalankan sebuah program yang bernama KPU Goes To Campus (KGTC) yang dimana program ini menekankan pada kalangan milenial untuk terus belajar tentang politik dan mengenali partai maupun calon kandidat wakil rakyat yang akan

dipilih agar salah pilih. Kalangan milenial merupakan generasi pengguna internet terbanyak, karena segalanya dapat diakses dengan mudah melalui internet apalagi momentum pemilu berita bersifat politik banyak bermunculan pada Gadget setiap orang, oleh karenanya KPU melalui KGTC melakukan edukasi kepada masyarakat khusus kalangan milenial untuk lebih memilah berita serta berhati-hati dengan berita yang beredar, sebab saat ini berita Hoax banyak tersebar di media sosial dan lebih kritis lagi dalam menyikapi pemberitaan. Tidak hanya lewat event saja KPU dalam mensosialisasikan programnya tetapi melalui banyak media seperti dengan menggunakan poster dan juga menggunakan New Media melalui Channel youtube, KPU menghimbau kepada masyarakat khususnya milenial untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang.

Tidak hanya menggunakan media massa sebagai promosi KPU juga menggunakan Youtube sebagai sarana menyampaikan informasi, yang dimana tujuannya untuk menasar kalangan milenial, seperti banyak kita ketahui saat ini para pemilih milenial lebih banyak menggunakan youtube untuk mencari informasi, hal ini sejalan dengan apa yang ingin KPU targetkan yaitu dengan meningkatkan kesadaran para pemilih milenial untuk turut berpartisipasi dan menentukan sikap politiknya dalam pemilihan umum..

Penelitian ini mengambil fokus pada sikap pemilih milenial surabaya terhadap hasil pilpres 2019 pada media massa. studi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Artinya pada penelitian ini menjelaskan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai gejala komunikasi yang diteliti. Pada penelitian ini merupakan data kuantitatif yaitu berupa data angka dan tabel perhitungan.

Alat dan teknik pengumpulan data yaitu melalui Kuesioner dengan narasumber para milenial yang telah memiliki hak pilih di Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah "Sikap Pemilih Milenial Surabaya Terhadap Hasil Pilpres 2019 Pada Media Massa".

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dalam perumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui Sikap Pemilih Milenial Surabaya Terhadap Hasil Pilpres 2019 Pada Media Massa.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini peneliti berharap dapat menjadi masukan serta referensi dalam menjalankan program-program yang berguna untuk masyarakat serta mengatasi permasalahan yang sedang terjadi terkait hasil pemilihan presiden yang belakangan ini tengah ramai diperbincangkan pada media massa. Selain itu hasil penelitian ini bisa diharapkan menambah pengetahuan atau wawasan dan dapat digunakan sebagai pembanding, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi, bagi rekan-rekan yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa terkait sikap pemilih milenial pada pilpres 2019.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberi suatu wawasan, pengetahuan serta pengalaman dalam menerapkan teori ke dalam praktek yang sesungguhnya.
- b. Sebagai kontribusi untuk KPU dalam meningkatkan peran dan strategi instansi untuk memperbaiki sistem pemilihan umum agar lebih baik kedepannya.
- c. Sebagai bahan untuk membandingkan penelitian dari mahasiswa lain dalam mempelajari ilmu komunikasi yang berkaitan dengan sikap politik milenial
- d. Sebagai informasi ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi politik kalangan milenial, sehingga dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil untuk meningkatkan potensi kalangan milenial dalam berpartisipasi pada kegiatan politik yang akan datang.